Peran BAN-PT dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

Gianto[1*], Rusydi Kurniawan[2]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris[1,2]
*e-mail: ggianti04@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, namun masih dihadapkan pada permasalahan mutu yang ditandai oleh disparitas kualitas antarperguruan tinggi, keterbatasan tata kelola, serta rendahnya daya saing global. Kondisi tersebut menuntut keberadaan sistem penjaminan mutu eksternal yang kredibel dan berkelanjutan, di mana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memiliki posisi sentral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, ditinjau dari aspek historis, yuridis, dan fungsional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu eksternal yang mendorong perbaikan berkelanjutan, penguatan tata kelola perguruan tinggi, serta peningkatan akuntabilitas publik. Penerapan Instrumen Akreditasi Sembilan Kriteria merefleksikan pergeseran paradigma penilaian mutu yang lebih berorientasi pada luaran dan dampak institusional. Pembahasan juga mengungkap adanya tantangan berupa kesenjangan kapasitas antarperguruan tinggi dan beban administratif akreditasi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi berperan strategis dalam pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi, namun perlu didukung oleh penguatan kebijakan afirmatif, penyempurnaan instrumen berbasis luaran, serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan perguruan tinggi sebagai rekomendasi ke depan.

Kata kunci : Akreditasi; BAN-PT; Pendidikan Tinggi; Penjaminan Mutu; Kualitas Akademik

ABSTRACT

Higher education plays a strategic role in national development; however, it continues to face quality-related challenges, including disparities among higher education institutions, limitations in governance, and weak global competitiveness. These conditions necessitate a credible and sustainable external quality assurance system, in which the National Accreditation Agency for Higher Education holds a central position. This study aims to analyze the role of the National Accreditation Agency for Higher Education in ensuring the quality of higher education in Indonesia from historical, juridical, and functional perspectives. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design based on a literature study, using secondary data derived from laws and regulations, official documents of the National Accreditation Agency for Higher Education, scholarly books, and relevant national academic journals. The findings indicate that accreditation conducted by the National Accreditation Agency for Higher Education functions as an external quality control instrument that promotes continuous improvement, strengthens institutional governance, and enhances public accountability. The implementation of the Nine Criteria Accreditation Instrument reflects a paradigm shift in quality assessment toward an outcome- and impact-oriented approach. The discussion also reveals several challenges, including capacity disparities among higher education institutions and the administrative burden associated with the accreditation process. Therefore, it can be concluded that the National Accreditation Agency for Higher Education plays a strategic role in fostering a quality culture within higher education institutions. Nevertheless, this role must be reinforced through affirmative policies, refinement of outcome-based accreditation instruments, and sustained synergy between the government and higher education institutions as future recommendations.

Keywords **:** *Accreditation; BAN-PT; Higher Education; Quality Assurance; Academic Quality*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi sarana utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkontribusi langsung terhadap kemajuan bangsa. Dalam konteks globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, mutu pendidikan tinggi menjadi indikator utama daya saing suatu negara di tingkat internasional (Hidayat, 2021). Namun demikian, realitas pendidikan tinggi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, seperti disparitas kualitas antarperguruan tinggi, rendahnya kinerja penelitian dan publikasi internasional, serta keterbatasan tata kelola sumber daya manusia dan infrastruktur akademik (Kurniawan & Prasetyo, 2022). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem penjaminan mutu yang kredibel, terstandar, dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan tinggi dapat ditingkatkan secara sistematis.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi secara konseptual dipahami sebagai serangkaian proses sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia, penjaminan mutu eksternal dilaksanakan melalui mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah. Akreditasi dimaknai sebagai proses evaluasi dan penilaian kelayakan perguruan tinggi dan program studi berdasarkan kriteria mutu tertentu untuk menjamin akuntabilitas publik serta mendorong perbaikan berkelanjutan (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2021). Dengan demikian, BAN-PT memiliki peran strategis tidak hanya sebagai lembaga penilai administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik dalam penguatan budaya mutu pendidikan tinggi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem akreditasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tata kelola perguruan tinggi dan penguatan budaya mutu akademik. Hidayat (2021) menegaskan bahwa akreditasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu yang mendorong peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi. Sementara itu, Kurniawan dan Prasetyo (2022) mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam implementasi akreditasi terletak pada ketimpangan kapasitas perguruan tinggi dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Di sisi lain, Putri dan Santoso (2023) menyoroti bahwa dinamika globalisasi menuntut reformulasi kebijakan akreditasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan internasional. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak hasil akreditasi, sementara analisis komprehensif mengenai sejarah, landasan hukum, serta mekanisme kerja BAN-PT secara terpadu masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap riset yang menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan BAN-PT sebagai aktor kunci dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dari perspektif historis, yuridis, dan fungsional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji peran BAN-PT tidak hanya sebagai lembaga akreditasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di tengah tantangan global. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis sejarah dan landasan hukum BAN-PT, mengidentifikasi tugas, fungsi, serta mekanisme kerjanya, menganalisis peran BAN-PT dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta mengkaji tantangan, kritik, dan prospek inovasi akreditasi ke depan. Secara implikatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan akreditasi pendidikan tinggi serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui analisis konseptual, normatif, dan kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan akreditasi, dokumen resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, buku ilmiah, serta

artikel jurnal nasional yang relevan dengan topik penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan tinggi. Sumber data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen (documentary study), yaitu dengan menginventarisasi, membaca secara kritis, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sejarah, landasan hukum, tugas, fungsi, peran, tantangan, serta prospek inovasi akreditasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan literatur dan regulasi dengan kerangka konseptual penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai posisi strategis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan respons kebijakan yang bersifat strategis terhadap kebutuhan penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum pembentukan BAN-PT, evaluasi mutu perguruan tinggi cenderung bersifat internal dan belum memiliki standar nasional yang seragam, sehingga menimbulkan disparitas kualitas antarperguruan tinggi. Pendirian BAN-PT pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat menandai upaya negara dalam membangun sistem penjaminan mutu yang objektif dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan tinggi (Hidayat, 2021). Dari perspektif hukum, penguatan posisi BAN-PT tercermin dalam Undang-Undang Nomor Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Belas tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa akreditasi merupakan instrumen utama penjaminan mutu eksternal. Ketentuan ini diperkuat dengan berbagai peraturan menteri dan peraturan BAN-PT yang mengatur mekanisme, instrumen, dan standar akreditasi. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan nasional peningkatan mutu pendidikan tinggi (BAN-PT, 2020).

Perkembangan kebijakan akreditasi menunjukkan adanya transformasi paradigma penjaminan mutu. Penerapan Instrumen Akreditasi Sembilan Kriteria merefleksikan pergeseran orientasi penilaian dari dominasi aspek input dan proses menuju penekanan pada luaran dan dampak institusional. Pendekatan ini menempatkan mutu lulusan, produktivitas penelitian, dan kontribusi sosial perguruan tinggi sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan tinggi. Dengan demikian, BAN-PT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penilai, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan mutu pendidikan tinggi nasional. Hasil analisis terhadap tugas dan fungsi BAN-PT menunjukkan bahwa akreditasi berperan sebagai mekanisme pengendalian mutu eksternal yang mendorong perguruan tinggi melakukan perbaikan berkelanjutan. Penilaian kelayakan institusi dan program studi dilakukan secara komprehensif dengan mencakup aspek akademik, tata kelola, sumber daya manusia, keuangan, serta luaran tridarma perguruan tinggi. Fungsi ini menempatkan BAN-PT sebagai aktor kunci dalam menjaga konsistensi mutu pendidikan tinggi di tengah keragaman kapasitas institusi (Setiawan, 2021).

Selain fungsi penilaian, BAN-PT juga menjalankan peran strategis dalam pemberian rekomendasi kebijakan. Hasil akreditasi tidak hanya berdampak pada status institusi, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi berfungsi sebagai jembatan antara evaluasi akademik dan pengambilan keputusan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional (Susanto & Pratama, 2021). Digitalisasi mekanisme akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online menjadi temuan penting dalam kajian ini. Pemanfaatan sistem daring meningkatkan efisiensi proses, memperluas akses, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Digitalisasi tersebut juga mencerminkan adaptasi BAN-PT terhadap perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis data.

Dalam konteks penjaminan mutu akademik, hasil kajian menunjukkan bahwa akreditasi mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas kurikulum, relevansi pembelajaran, serta kompetensi dosen.

Penilaian terhadap kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendorong institusi untuk memperkuat kontribusi akademiknya terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, akreditasi berperan sebagai instrumen yang memengaruhi perilaku institusional perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu tridarma (Arifin & Wahyudi, 2021). Dari sisi manajerial, akreditasi berimplikasi pada penguatan tata kelola perguruan tinggi. Penilaian terhadap tata pamong, kepemimpinan, perencanaan strategis, dan sistem penjaminan mutu internal mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran BAN-PT tidak terbatas pada mutu akademik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas manajemen institusi pendidikan tinggi (Firmansyah, 2022).

Akreditasi juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Publikasi status akreditasi memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai mutu perguruan tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Dalam konteks ini, BAN-PT berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan memperkuat legitimasi sosial institusi pendidikan tinggi (BAN-PT, 2021). Meskipun demikian, hasil kajian mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan akreditasi. Keterbatasan jumlah dan kapasitas asesor menjadi kendala utama dalam menjamin obyektivitas dan efektivitas asesmen, terutama dengan meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan program studi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi penilaian dan kualitas hasil akreditasi (Hidayat, 2021).

Selain itu, terdapat kesenjangan kemampuan antara perguruan tinggi besar dan kecil dalam memenuhi standar akreditasi. Perguruan tinggi dengan sumber daya yang lebih kuat cenderung lebih mudah mencapai peringkat akreditasi tinggi, sementara perguruan tinggi yang masih berkembang menghadapi keterbatasan struktural. Fenomena ini memunculkan kritik bahwa sistem akreditasi berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan tinggi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif (Kurniawan, 2022). Kritik lain diarahkan pada instrumen akreditasi yang masih dianggap terlalu administratif. Beban dokumentasi yang tinggi sering kali dinilai tidak sebanding dengan peningkatan mutu substantif yang dihasilkan. Kritik ini menegaskan perlunya penyempurnaan instrumen akreditasi agar lebih berorientasi pada luaran nyata dan dampak institusional pendidikan tinggi (Santoso & Lestari, 2023). Hasil kajian juga menunjukkan bahwa prospek akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia mengarah pada penguatan pendekatan berbasis luaran, integrasi dengan sistem penjaminan mutu internal, serta digitalisasi yang lebih lanjut. Pergeseran ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi, kredibilitas, dan daya saing global pendidikan tinggi Indonesia, sekaligus menegaskan peran strategis BAN-PT sebagai aktor utama dalam pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi (Nurhadi, 2022; Rahman, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal yang menilai kelayakan akademik, tata kelola, serta kinerja tridarma perguruan tinggi secara komprehensif. Melalui mekanisme akreditasi, BAN-PT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penilai administratif, tetapi juga sebagai pengendali mutu dan pendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keberadaan BAN-PT dengan kerangka regulasi yang kuat telah berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas publik, peningkatan tata kelola institusi, serta pembangunan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Namun demikian, untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya di tengah dinamika global dan perkembangan pendidikan tinggi, diperlukan penguatan dan pembaruan kebijakan akreditasi yang lebih berorientasi pada luaran dan dampak institusional, didukung oleh digitalisasi proses serta penyelarasan dengan standar mutu internasional. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan tinggi tidak dapat bergantung pada BAN-PT semata, melainkan memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara BAN-PT, perguruan tinggi, dan pemerintah melalui penguatan sistem penjaminan mutu internal, kebijakan pembinaan yang afirmatif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, akreditasi diharapkan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi periodik, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam menghasilkan lulusan yang unggul, penelitian yang bermutu, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak luas, sehingga mampu memperkuat daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z., & Wahyudi, H. (2021). Kualitas akademik perguruan tinggi melalui instrumen akreditasi sembilan kriteria. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia, 8*(1).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2020). *Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang mekanisme akreditasi*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2021). *Laporan akuntabilitas kinerja Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*. BAN-PT.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2021). *Pedoman akreditasi perguruan tinggi*. BAN-PT.

Firmansyah, R. (2022). Good governance dalam tata kelola perguruan tinggi: Analisis akreditasi BAN-PT. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 14*(2).

Hidayat, A. (2021). Kapasitas asesor dalam proses akreditasi BAN-PT: Tantangan dan solusi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan, 5*(2).

Hidayat, A. (2021). Peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam era revolusi industri empat titik nol. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia, 5*(2).

Hidayat, S. (2021). Sejarah penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 6*(1).

Kurniawan, D. (2022). Kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia: Perspektif akreditasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi, 14*(1).

Kurniawan, D., & Prasetyo, R. (2022). Tantangan dan peluang perguruan tinggi di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 14*(1).

Nurhadi, M. (2022). *Lembaga akreditasi mandiri dan masa depan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia*. Deepublish.

Pratama, D., & Lestari, A. (2023). *Akreditasi perguruan tinggi dan daya saing lulusan di era global*. Kencana.

Putri, N., & Santoso, B. (2023). *Globalisasi dan mutu perguruan tinggi: Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Rahman, M. (2021). Menuju akreditasi internasional: Tantangan BAN-PT dalam globalisasi pendidikan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 9*(3).

Santoso, B., & Lestari, F. (2023). *Kritik terhadap instrumen akreditasi BAN-PT: Administrasi versus substansi*. Prenadamedia Group.

Setiawan, H. (2021). Peran BAN-PT dalam pengendalian mutu perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tinggi, 7*(2).

Susanto, R. (2022). Instrumen akreditasi sembilan kriteria dan implikasinya terhadap mutu pendidikan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 12*(1).

Susanto, R., & Pratama, A. (2021). Implementasi instrumen akreditasi sembilan kriteria dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi, 9*(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012).

Yuliana, R., & Prasetyo, A. (2023). *Kebijakan otomatisasi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia*. Rajawali Pers.